

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli, 2021, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*.
- Amiruddin Zainal, dan Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar Arifin, 2015, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief Sidharta, 2011, *Hukum dan Logika: Relevansi Hukum dengan Logika*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Asep Suherman, 2025, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyo, 2021, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darma dkk, 2010, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Jakarta : Mediakita.
- Darwin Prinst, 2011, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Deder Rosyada, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Denny Indrayana, 2009, *Amandemen UUD 1945: Konstitusi Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abdi Tama.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Ibrahim Fikma, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Lampung : Sai Wawai Publishing.

Jimly Asshidiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill Co.

Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jimly Asshidiqie, 2011, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MK.

Jum Anggriani, 2024, *Penegakan Hak Asasi Manusia*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Lorens Bagus, 2002, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia.

Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : Rajawali Pers.

Mansur, M. Arief, 2015, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Rafika Aditama.

Maria Farida, Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Nurus Zaman, 2021, *Konstitusi dalam Perspektif Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Pratiwi Bernadetta Purba, 2025, *Pendidikan di Era Digital: Tantangan bagi generasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Ph. Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan.

Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Ra ja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Syamsidar dan Muhammad Reza, 2023, *Tantangan Menjaga Kebebasan berpendapat di Era Digital*, Malang : Literasi Nusantara Abadi.

Titis Anindyajati, 2024, *Hak Kebebasan Berpendapat dalam Konstitusi*, Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal Ilmiah

Ahmad Ramli. 2021, *"Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE"*. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Asep Suherman, 2025, *"Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Era Digital : Teori Relativisme Hak Asasi Manusia"*, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.10. No.1.

B Sutyoso, 2010. *"Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia"*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6.

Daniel Nicholaes Sujarwanto,. 2023. *"Penegakan Hukum dalam Perspektif Pancasila"*. *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 1.

Didi Yusianto, 2022, *"Peranan Kepolisian dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Hoax"*. *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5. No. 1.

Della Luysky Selian dkk, 2018, *"Kebebasan Berpendapat di Era Reformasi."* *Jurnal HAM*, Vol.2 No.2

Edna Raquel Hogemann, 2019, *" Human Rights Beyond Dichotomy Between, Cultural Universalism and Relativism."* *Journal of Human Rights*, Vol. 13. No.1.

Harry Saptarianto,. 2024. *"Menghadapi Tantangan Strategi Integrasi Media Sosial, Literasi Digital dan Inovasi Bisnis"*. *Jurnal Manuhara*, Vol. 2, No. 3.

Heri Kusmanto, 2014, *"Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik"*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol.2. No.1.

Jailani, 2019, *"Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik"*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2 No.1.

John W. Johnson, 2001, *"Peran Media Bebeas dalam Demokrasi, Office of International Information Program, U.S. Departement of State.*

M. Irfan Pratama,. 2022. *"Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Prespektif HAM"*. *Jurnal Qawanin Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Moh. Faizur Rohman. 2017. *"Hak Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Maqashid Syariah."* *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 5 No. 2.

Muhammad Junaidi, 2018. *"Konstitusionalisme dalam Perspektif Hukum dan Politik di Indonesia"*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1.

- Nanda, D. H. & Hariyanta, F. A. 2021. "Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2
- Nur Afifa Ardani, 2018, "*Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia*," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.13. No.1.
- Nur Yusriyyah Bakhtiar, 2020, "*Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*," *Journal of lex*, Vol.1. No.1.
- Ningrat, S. R. C. & Nulhaqim, S. A. 2023. "Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia". *EPISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 4, No. 2.
- Puji Rahayu,. 2019. "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak". *Jurnal Lampung*, Vol. 2, No. 1.
- Saldi Isra, 2014. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3.
- Sutiyoso, B. 2010, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan HAM*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11. No.3.
- Syawaluddin Hanafi, 2017, "*Kewenangan MK dalam Menafsir UUD 1945*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16. No.1
- Serediuk, Vitalii dan Ilya Shutak. 2024. "Tektualisme sebagai Teori Penafsiran Norma Hukum dalam Konteks Pandangan Doktrinal." *Jurnal Tinjauan Undang-Undang Statuta*, Vol. 45, Edisi. 1.
- Vitalii Serediuk & Ilya Shutak, 2024, "*Tekstualisme sebagai Teori Penafsiran Norma Hukum dalam Konteks Pandangan Doktrinal*, *Jurnal Tinjauan Undang-Undang Statuta*, Vol.45. No.1.
- Wahyuningtyas Dwi Saputri, 2015, "*Implementasi Demokrasi dan HAM di Indonesia*" *Jurnal Inovatif*, Vol. 3. No.1.
- Wulan Novianti, 2023, "*Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXII/2023*. *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Yanto Rukmana, 2023. "Revolusi Bisnis Di Era Digital: Strategi dan Dampak Transformasi Proses Teknologi Terhadap Keunggulan Kompetitif dan Pertumbuhan Organisasi". *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*.

C. Internet

Hukumonline. (2025). *MK putusan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/> pada 3 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Batasan". Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batasan>. Diakses pada 4 Agustus 2025.

Detik.com. (2025). *Perjalanan kasus UU ITE Daniel aktivis Karimunjawa hingga divonis 7 bulan bui*. Diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7280919/perjalanan-kasus-uu-ite-daniel-aktivis-karimunjawa-hingga-divonis-7-bulan-bui> Diakses pada 5 Agustus 2025.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI

Risalah Rapat DPR RI dan Pemerintah

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Naskah Akademik RUU ITE Tahun 2008 dan 2016.

